

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/

KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2011-2015

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Saiful Anwar Zulfakar

Nomor Mahasiswa : 13313276

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2017

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/
KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2011-2015
SKRIPSI**



Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi, Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Saiful Anwar Zulfakar

Nomor Mahasiswa : 13313276

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2017

Penulis.



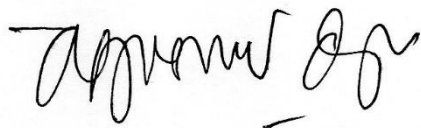
Saiful Anwar Zulfakar

PENGESAHAN

Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015

Nama : Saiful Anwar Zulfakar
Nomor Mahasiswa : 13313276
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 20 Januari 2017
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Agus Widarjono Drs. M.A., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

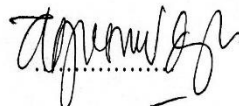
Disusun Oleh : **SAIFUL ANWAR ZULFAKAR**

Nomor Mahasiswa : **13313276**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 20 Februari 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Agus Widarjono, SE., MA.,Ph.D

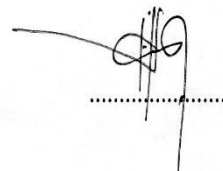


.....
Ktiw

Penguji : Ari Rudatin, Dra., M.Si.

.....

Heri Sudarsono, SE.,MEc



.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

- “Jangan sampai salah seorang dari kalian meninggal dalam dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah SWT (HR Muslim dari Jabir ra)
- Dari sebuah kesabaran akan didapatkan sebuah hasil yang sepadan dari itu. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya dan melipat gandakannya tanpa terhitung. Firman-Nya

ما عندكم ينفد وما عند الله باق و لنجز بينّ الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

apa yang disimu akan lenyap, dan apa yang ada disisi Allah adalah kekal.

Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

(An-nahl:96)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tiada henti yang selalu penulis panjatkan atas ridho, rahmat, dan hidayah-Nya, serta kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan harapan yang telah terpenuhi. Skripsi yang telah ditulis ini, penulis persembahkan untuk :

- Terima kasih kepada orangtua, Ibuku Mustanah dan Ayahku Paing Abdul Kadir yang telah memberikan semangat, dukungan, doanya, kasih sayang yang luar biasa ini
- Terimakasih buat kakak – kakak ku Rona Vita dan Merina yang telah membantu memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini
- Warga Asrama Rahadi Osman 2 Yogyakarta terimakasih selalu memberikan semangat sampai terselesainya tugas akhir ini
- Sahabat – sahabat Tim Katak – Katak (Jagad, Saipul Bahri, Fajar, Hagi, Budi, Bule, Zidni, Irangga, Dwiki, Ucup, Endra, Indra, Hafis, Dafi, Reza, Neka, Simon, Iam, Dading) terimakasih atas dukungan dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini
- Untuk teman – teman KKN Unit 216 (Septi, Sigit, Rifky, Intan, Dhira, Dewi dan Eka)

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses penulisan hasil penelitian ini yang berjudul “**Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 - 2015**”. Shalawat serta salam selalu tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan karena syafaatnya kita dapat terhindar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis tidak lupa pula mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT berkar rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan yang dilimpahkan-Nya kepada penulis selama menulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Agus Widarjono Drs. M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah membimbing dan

memberikan arahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Ilmu-ilmu dan pengalaman yang Bapak berikan kepada penulis selama menempuh jenjang Strata 1 juga dijadikan penulis sebagai bekal untuk kedepannya.

3. Seluruh Dosen dan Staf karyawan UII Yogyakarta yang telah mewariskan ilmunya kepada kami dengan tulus
4. Teman – teman jurusan ilmu ekonomi FE UII terimakasih atas sumbangan saran, pemikiran dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini
5. Serta semua pihak yang tidak mungkin kami sebut satu per satu, tanpa bermaksud untuk mengurangi terima kasih penulis kepada kalian semua

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah SWT, begitu pun dengan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharapkan kritik serta saran agar dapat menjadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2017

Saiful Anwar Zulfakar

NIM : 13313276

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Skripsi	v
Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstraks	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1. Kajian Pustaka	10
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1. Pembangunan Ekonomi	15

2.2.2. Pembangunan Ekonomi Daerah	17
2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi	20
2.2.4. Faktor – Faktor Pertumbuhan Ekonomi	21
2.2.5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah	22
2.2.6. Hipotesis Kuznets.....	27
2.2.7. Definisi Ketimpangan	28
2.2.8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	31
2.2.9. Pengangguran.....	33
2.2.10. Pengeluaran Pemerintah.....	36
2.2.11. Investasi.....	38
2.2.12. Hubungan Variabel Bebas (Independen) dengan Variabel Mengikat (Dependen).....	39
2.2.13. Hipotesis.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis dan Sumber Data	43
3.2. Metode Analisis	43
3.3 Indeks Williamson	43
3.4 Regresi Data Panel	44
3.4.1. Metode Common Effects	45
3.4.2. Metode Fixed Effects	46
3.4.3. Metode Random Effects.....	46
3.5. Pemilihan Model dalam Pengolahan Data	46
3.5.1. Uji Chow Test	47

3.5.2. Uji Hausman.....	48
3.6. Pengujian Hipotesis.....	49
3.6.1. Koefisien Determinasi (R^2).....	49
3.6.2. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Bersama – sama).....	49
3.6.3. Uji t (Pengujian Variabel Secara Individu).....	50
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Indeks Ketimpangan Williamson	52
4.2. Variabel Penelitian.....	53
4.3. Uji Menentukan Model Panel	54
4.3.1. Uji Chow	54
4.3.2. Uji Hausman.....	55
4.4. Pengujian Hipotesis	57
4.4.1. Koefisien Determinasi (R^2)	57
4.4.2. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Bersama – sama).....	57
4.4.3. Uji t (Uji Variabel Secara Individu)	58
4.5. Hasil dan Pembahasan.....	60
4.5.1. Analisis Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	63
4.5.2. Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	63
4.5.3. Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	64

4.5.4. Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	65
BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Implikasi	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Atas Harga Konstan 2000	3
Tabel 1.2	Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2015	5
Tabel 1.3	Rata – rata Gini Rasio Antar Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2015	6
Tabel 4.1	Indeks Ketimpangan Williamson di Provinsi Kalimantan Barat ...	52
Tabel 4.2	Uji Chow	54
Tabel 4.3	Uji Hausman	55
Tabel 4.4	Hasil Estimasi Random Effects Model	56
Tabel 4.5	Uji Determinasi (R^2)	57
Tabel 4.6	Uji F	57
Tabel 4.7	Uji t	60
Tabel 4.8	Intersep Masing – masing Daerah	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2015 (Juta Rp)	4
Gambar 2.1	Kerangka Penelitian	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Data Indeks Williamson (Y), Pengangguran (X1), Belanja Daerah (X2), Investasi (X3), PDRB Per Kapita (X4)	72
Lampiran II	: Hasil Estimasi <i>Common Effects</i>	74
Lampiran III	: Hasil Estimasi <i>Fixed Effects</i>	75
Lampiran IV	: Hasil Estimasi <i>Random Effects</i>	76
Lampiran V	: Indeks Williamson Tahun 2011	77
Lampiran VI	: Indeks Williamson Tahun 2012	78
Lampiran VII	: Indeks Williamson Tahun 2013	79
Lampiran VIII	: Indeks Williamson Tahun 2014	80
Lampiran IX	: Indeks Williamson Tahun 2015	81

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, menganalisis dan mengetahui ketimpangan pembangunan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan variabel bebas pengangguran, belanja pemerintah daerah, investasi dan PDRB per kapita. Data yang digunakan adalah data *cross section* dan data *time series* yang biasanya disebut dengan data panel pada tahun 2011-2015 dengan metode *Random Effects Model (REM)* pada program *eviews 8*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Indeks Williamson di Provinsi Kalimantan Barat masih tergolong rendah walaupun mengalami kenaikan, variabel pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat menganggur, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang sudah bekerja, tetapi jam kerja kurang dari 35 jam per minggu. Sehingga masyarakat tersebut masih produktif dalam suatu wilayah tersebut, tetapi tingkat produktifitasnya rendah. Variabel belanja pemerintah daerah dan investasi berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci : Indeks Williamson, REM, Pengangguran, Investasi, Belanja Pemerintah Daerah, PDRB per kapita

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan, yang dimana terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Di setiap 5 pulau besar tersebut pasti membutuhkan sebuah pembangunan ekonomi. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Didalam pembangunan Indonesia pasti memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketimpangan terjadi karena salah satu faktor seperti pemerintah lebih membangun daerah perkotaan dan di daerah hanya beberapa yang tersentuh oleh pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena di wilayah Kalimantan Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini diantaranya karakteristik alam, social, ekonomi, dan sumber daya alam di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Akibat dari perbedaan ini, setiap suatu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan pasti juga berbeda caranya.

Dalam pembangunan pasti mempunyai pro dan kontra dari masyarakat. Ketidakpuasan dan kritik yang timbul dalam proses pembangunan pada dasarnya bukanlah semata – mata adanya pertumbuhan yang telah dicapai, akan tetapi karena perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang

mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, bahkan ketimpangan pendapatan semakin besar dan telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, dan lain – lain.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari kurun waktu 2013 – 2015, adanya peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yang artinya adanya perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya peningkatan ini bisa dikatakan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat secara umum makmur. Akan tetapi jika di lihat dari tingkatannya sangat bervariasi dan memiliki perbedaan pendapatan yang cukup timpang.

Pada dasarnya perbedaan ini disebabkan demografi yang berbeda setiap daerah yang ada di Kalimantan Barat sehingga berbeda pula keadaan ekonomi dan sumber daya yang dimilikinya. Walaupun di daerah – daerah Kabupaten banyak perusahaan – perusahaan atau kawasan industri masih saja sulit untuk bersaing dengan daerah di sekitarnya baik itu Kabupaten ataupun Kota.

Tabel 1. 1
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2000
Provinsi Kalimantan Barat
2013 – 2015
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2013	2014*	2015**
Kab Sambas	19.720.691,13	20.613364,89	21.456.244,68
Kab Bengkayang	18.792.801,30	19.204.696,40	19.484.689,34
Kab Landak	15.037.272,66	15.537069,88	16.115.828,54
Kab Pontianak	15.213.412,11	15.893.564,03	16.634.061,61
Kab Sanggau	23.930.255,03	24.270.802,70	24.719.703,61
Kab Ketapang	27.735426,66	27.616.785,39	28.423.374,76
Kab Sintang	18.472.483,74	19.159.012,17	19.767.304,34
Kab Kapuas Hulu	20.629.396,90	21.068.859,37	21.550.904,85
Kab Sekadau	16.100.388,78	16.925.260,46	17.750.568,10
Kab Melawi	13.550.704,29	13.952.260,46	14.320.309,55
Kab Kayong Utara	18.301.456,31	19.006.972,79	19.547.319,58
Kab Kubu Raya	24.224.554,05	25.313.118,27	26.561.208,13
Kota Pontianak	31.890.035,24	33.166.588,93	34.226.641,64
Kota Singkawang	25.068.491,68	26.268.219,16	27.164.851,78

Sumber : *BPS Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka*, berbagai edisi

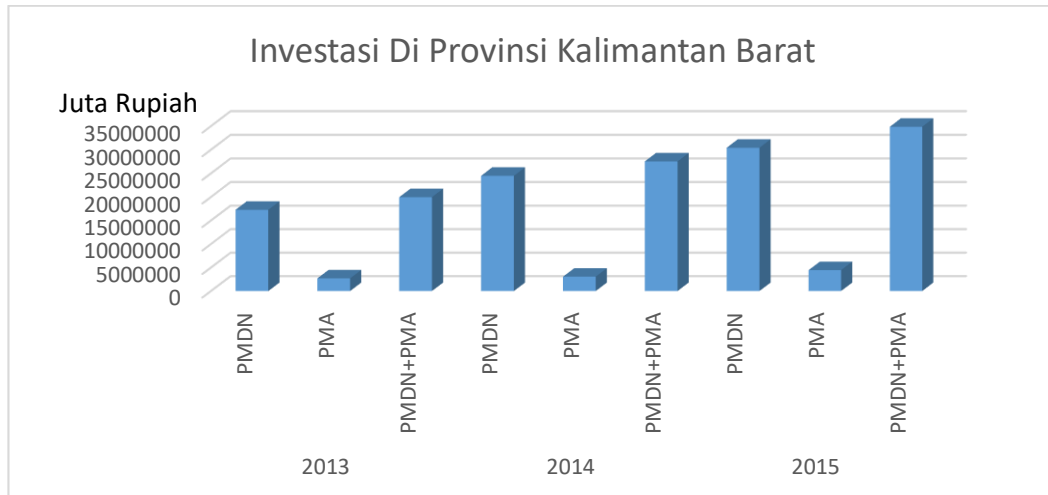
Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 – 2015 dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki kontribusi tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat disusul Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang.

Sjafrizal (2012), terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah, salah satunya adalah alokasi dana pembangunan antar wilayah baik dari investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi dari luar negeri (PMA). Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong perekonomian suatu wilayah

melalui penyerapan tenaga kerja pada wilayah tersebut. Akan tetapi investasi juga bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, berbagai edisi

**Gambar 1.1 Investasi PMDN Dan PMA
Perkembangan Investasi Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2015**

Dapat dilihat dari gambar 1.1 di atas bahwa perkembangan investasi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2013 realisasi investasi Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 19.963.894 (Juta) dan pada tahun 2014 investasi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebesar Rp. 27.526.217,89 (Juta), begitu juga terjadi kenaikan pada tahun 2015.

Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013-2015. Akan tetapi walaupun mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut, tren iklim investasi tidak mengalami penurunan. Alasan nya adalah ada beberapa daerah membutuhkan suntikan dana untuk membangun kawasan

industri sehingga nantinya bisa meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketimpangan antar daerah di Kalimantan Barat.

Tidak hanya investasi saja yang dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi faktor demografi juga dapat mempengaruhi ketimpangan tersebut. Salah satu diantaranya adalah jumlah pengangguran yang ada di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat. Tingginya pengangguran di setiap Kabupaten/Kota menandakan bahwa ini disebabkan tidak meratanya pembangunan di setiap wilayah sehingga sedikit tersedianya lapangan pekerjaan.

Tabel 1.2
Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 – 2015
(Jiwa)

No	Kab/Kota	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Kab Sambas	7.481	10.097	12.865
2	Kab Bengkayang	2.540	4.166	3.979
3	Kab Landak	5.150	5.926	10.306
4	Kab Pontianak	5.652	6.357	7.924
5	Kab Sanggau	1.612	7.222	12.125
6	Kab Ketapang	9.804	4.746	9.792
7	Kab Sintang	4.350	6.563	5.052
8	Kab Kapuas Hulu	2.371	2.477	3.888
9	Kab Sekadau	1.403	326	3.068
10	Kab Melawi	3.860	2.530	3.090
11	Kab Kayong Utara	2.150	2.038	1.927
12	Kab Kubu Raya	20.656	15.132	15.848
13	Kota Pontianak	15.313	18.514	26.325
14	Kota Singkawang	4.001	7.625	5.148
Kalimantan Barat		86.343	93.719	121.337

Sumber : *BPS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat*, berbagai edisi

Berdasarkan Tabel 1.2, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi. Dapat dikatan

bahwa penyumbang terbesar dari pengangguran tersebut berada pada daerah pedesaan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa di daerah perkotaan juga bisa mempunyai pengangguran yang banyak. Hal lain yang mengakibatkan tingginya pengangguran adalah pertumbuhan PDRB yang tidak diikuti dengan terciptanya lapangan kerja di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1.3
Rata – rata Gini Rasio Antar Kalimantan
Tahun 2013-2015
(%)

Provinsi	Gini Rasio (%)			
	2013	2014	2015	Rata - rata
Kalimantan Tengah	0.35	0.35	0.33	0.343
Kalimantan Timur	0.37	0.35	0.32	0.346
Kalimantan Selatan	0.36	0.36	0.35	0.356
Kalimantan Barat	0.40	0.39	0.33	0.373
Indonesia	0.41	0.41	0.41	0.41

Sumber: *BPS, Rasio Gini Menurut Provinsi*

Penulis tertarik melakukan penelitian di Provinsi Kalimantan Barat karena adanya perbedaan distribusi pendapatan (gini rasio) yang membedakan antara golongan kaya dan miskin (tercermin dalam PDRB per kapita) di suatu daerah, dimana perbedaan tersebut diakibatkan perbedaan perkembangan/pembangunan di masing – masing daerah. Rata-rata gini rasio Kalimantan Barat terhadap se-Kalimantan berada pada posisi terakhir, artinya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Kalimantan Barat cukup timpang. Dengan kata lain perbedaan pendapatan berarti perbedaan dalam segi pembangunan antara satu daerah dengan

daerah lainnya, Sedangkan untuk mengukur ketimpangan pembangunan penulis harus menggunakan data dari PDRB per kapita masing – masing daerah sebagai data dasar perhitungan, sehingga penulis ingin mengetahui seberapa besar ketimpangan yang terjadi Antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Atas pemikiran tersebut, sehingga penulis mengambil judul **“ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 – 2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat?
4. Bagaimana pengaruh investasi Kabupaten/Kota terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?
5. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Barat
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat
3. Menganalisis pengaruh tingkat pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat
4. Menganalisis pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat
5. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

- a. Bagi penulis sendiri, dengan harapan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan dari pemahaman tentang teori dan konsep yang telah diperoleh dalam perkuliahan
- b. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dan memberikan acuan untuk penelitian berikutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan masalah ketimpangan

- c. Bagi Fakultas Ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ekonomi pembangunan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan variabel, analisis variabel serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu kita merujuk pada penelitian terdahulu yang membahas tentang ketimpangan pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun tingkat Daerah.

Rachma (2016) menganalisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar Kecamatan di Kabupaten Grobongan Tahun 2010-2014, dengan alat analisis Location Quotient (LQ), Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Entropi Theil, dan Kuznets “U” terbalik. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan selama periode penelitian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobongan baik dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Selama 5 tahun Kabupaten Grobongan di dominasi sektor pertanian dan sektor perdagangan, industri pengolahan dan pertanian. Pada Kabupaten Grobongan ada 8 Kecamatan yang termasuk kategori daerah cepat maju dan tumbuh yaitu Kecamatan Purwodadi, Godong, Gubug, Tawangharjo, Tegowanu, Grobogan, Ngaringan, dan Wirosari, 1 Kecamatan daerah maju tetapi tertekan adalah Kecamatan Kedungjati, 1 Kecamatan daerah berkembang cepat adalah Kecamatan Toroh, dan 9 Kecamatan daerah yang relative tertinggal yaitu Kecamatan Karangrayung, Geyer, Kradenan, Penawangan, Pulokulon, Brati, Klambu, Gabus, dan Tanggungharjo. Indeks Williamson di Kabupaten Grobogan diketahui nilai ketimpangan PDRB di Kabupaten Grobogan, terjadi ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Grobogan terjadi kenaikan ketimpangan yang tidak

signifikan dengan kata lain relatif merata. Ketimpangan Theil di Kabupaten Grobogan mengalami ketimpangan menurun. Dalam penelitian hipotesis Kuznets mengenai “U” terbalik di Kabupaten Grobogan tidak berlaku dengan menunjukkan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan Indeks Williamson dan Indeks Theil.

Asih (2015), menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013, dengan alat analisis Tipologi Klassen, dan Regresi Data Panel FEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tipologi kelas tidak semua Kecamatan mengalami perkembangan pembangunan yang positif, 10 Kecamatan mengalami kemunduran dan kemunduran daerah menjadi daerah yang tertinggal. Regresi panel data menunjukkan bahwa komponen pertumbuhan *regional share* dihilangkan dari model, variable *proporsional shift* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, variable pertumbuhan *competitive shift* berpengaruh positif terhadap ketimpangan dan variabel jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan tinggi, jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan serta variabel pertumbuhan penduduk migrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Muhaimin (2014) menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2011, dengan alat analisis ketimpangan distribusi pendapatan, Hipotesis Kuznets, serta Regresi data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh negatif, sedangkan variabel inflasi, ump dan kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa.

Prasetyo (2014) menganalisis ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2012, dengan alat analisis uji Tipologi Klassen, Williamson, Entropy Theil dan Kuznets “U” terbalik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 4 kategori daerah, yaitu: Kabupaten daerah cepat maju dan tumbuh, Kabupaten daerah maju tapi tertekan, Kabupaten berkembang cepat dan Kabupaten daerah relative tertinggal. Hasil dari Indeks Williamson bahwa nilai ketimpangan PDRB di Provinsi Sumatera Utara terjadi kenaikan ketimpangan yang tidak terlalu signifikan, akan tetapi Indeks ketimpangan Theil mengalami ketimpangan yang menurun. Hipotesis kurva Kuznets mengenai “U: terbalik dapat dikatakan tidak berlaku di Provinsi Sumatera Utara dengan menunjukkan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan Indeks Williamson dan Indeks ketimpangan Theil.

Dhyatmka (2013) menganalisis ketimpangan pembangunan Provinsi Banten pasca pemekaran, dengan alat analisis Indeks Williamson, Tipologi Klassen, dan Analisis Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Menurut tipologi kelas, kota yang termasuk daerah maju dan cepat berkembang adalah Kota Tangerang dan Cilegon, daerah berkembang cepat adalah Kabupaten Tangerang dan daerah lainnya berada pada kategori daerah tertinggal. Hasil analisis data panel dengan metode FEM, penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif, pengeluaran pemerintah (GE) berpengaruh negatif terhadap

ketimpangan, sedangkan variable tingkat pengangguran (UE) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pasca pemekaran.

Harun (2012) dalam jurnalnya menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap ketimpangan pembangunan pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, dengan alat analisis Indeks Williamson dan metode regresi data panel dengan *Random Effect Model*. Hasil penelitiannya adalah pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Tama (2011) menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007-2009, dengan alat analisis Hipotesis Kuznets, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, dan Entropi Theil. Hasil penelitian ini didapatkan Hipotesis Kuznet berbentuk kurva “U” berlaku di Provinsi Sumatera Selatan. Tipologi daerah bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan termasuk kategori daerah cepat berkembang. Pada perhitungan Indeks Williamson tahun 2007-2009, bahwa nilai ketimpangan PDRB perkapita antar Kabupaten/Kota mencapai nilai rata – rata 0.33, sedangkan Indeks Ketimpangan Theil dari tahun pengamatan 2007-2009 mencapai rata – rata ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0.0084.

Angelina (2010) menganalisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008, dengan alat analisis statistik deskriptif dan regresi dengan variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi dan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menyimpulkan PDRB perkapita dan aglomerasi

berpengaruh signifikan positif dan variabel investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

Hartono (2008) menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, dengan alat analisis Indeks Williamson dan Regresi Time Series. Hasil penelitian bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan alat analisis Indeks Williamson dalam kurun waktu 1981-2005 cenderung relatif meningkat. Menurut regresi time series variable investasi swasta perkapita (X1), ratio angkatan kerja (X2) dan alokasi dana pembangunan perkapita (X3) dapat disimpulkan signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, serta hasil dari Uji-F bahwa ketiga variable tersebut bersama – sama berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan dari kajian pustaka yang diteliti oleh para peneliti, menunjukkan bahwa setiap daerah masih banyak yang mengalami lambatnya proses pembangunan yang disebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Terbukti proses pembangunan hanya berpusat pada daerah – daerah perkotaan saja sehingga proses kurang dirasakan oleh daerah pedesaan yang dianggap tidak memiliki potensi, sebagai pengambil kebijakan seharusnya pemerintah bisa memaksimalkan potensi – potensi yang terdapat di daera pedesaan dengan tujuan guna meratakan proses pembangunan sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan pembangunan daerah.

Apabila pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah pedesaan, bukan tidak menutup kemungkinan setiap tahun akan

menghasilkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang pastinya bisa mengurangi beban pemerintah pusat, karena adanya otonomi daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tujuan penulis memilih Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebagai objek karena ingin mengetahui seberapa besar perbedaan ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan system kelembagaan (Arsyad, 2010). Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu Negara meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Kuncoro, 2006).

Proses pembangunan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Menurut Todaro (2006), ada 3 (tiga) tujuan inti proses pembangunan yaitu

- 1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok
- 2) Peningkatan standar hidup
- 3) Perluasan pilihan – pilihan ekonomi dan social

Laju pembangunan suatu Negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Bruto atau GDP). Namun

cara tersebut memiliki kelemahan karena cara itu tidak secara tetap menunjukkan perbaikan kesejahteraan yang dicapai. Pada saat terjadi penambahan kegiatan ekonomi masyarakat, terjadi juga penambahan penduduk. Oleh karena itu penambahan kegiatan ekonomi ini digunakan untuk mepertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila penambahan GDP lebih rendah dibandingkan penambahan penduduk maka pendapatan perkapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Ini berarti penambahan GDP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi.

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembangunan. Menurut Jhingan (2012:338), salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Untuk dapat meningkatkan kemajuan perekonomian, suatu Negara harus memiliki persyaratan dasar dalam melakukan pembangunan. Berdasarkan M.L Jhingan (2012:41), prasyarat – prasyarat dasar bagi oembangunan ekonomi diantaranya:

- 1) Atas dasar kekuatan sendiri, hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materi; harus muncul dari warga Negara itu sendiri
- 2) Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas factor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan, sehingga diperlukan perbaikan dan penggantian lembaga sosio – ekonomi

- 3) Perubahan struktural, adanya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial dan motivasi yang ada secara radikal
- 4) Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis didalam proses pembangunan. Namun penyediaan atau penciptaan modal akan menjadi sia – sia kalau tidak ada faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi
- 5) Kriteria investasi yang tepat, merupakan tanggung jawab Negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat
- 6) Persyaratan sosio budaya, wawasan sosio budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat berjalan. Kenaikan pendapatan nasional tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan sosial, jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian budaya
- 7) Administrasi, kehadiran yang kuat, berwibawa dan tidak korup. Tanpa alat perlengkapan administrative yang baik dan efisien, rencana pembangunan publik maupun privat tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna

2.2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Perubahan system pemerintahan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah, dan juga Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang – Undang no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, telah membawa perubahan dalam

sistem pembangunan, dimana pemerintah diberi wewenang yang lebih dalam mengatur daerahnya masing – masing

Arsyad (2010) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi – intitusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan – perusahaa baru (Arsyad, 1997)

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber – sumberd daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Arsyad, 2010)

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari faktor – faktor yang mempengaruhi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi menurut para ekonom klasik maupun neo klasik diantaranya 1) jumlah penduduk, 2) jumlah stok barang modal

3) luas tanah dan kekayaan alam, dan 4) tingkat teknologi yang digunakan. Menurut Todaro (2006), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Akumulasi modal termasuk investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resource). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang ditabung kemudian di investasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa – masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang mengalami kenaikan bisa menjadi factor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya
3. Kemajuan teknologi dapat mengganti cara yang tradisional dalam melakukan pekerjaan dengan cara – cara yang baru dalam penggunaan teknologi ini. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni:
 - a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi – kombinasi input yang sama

- b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja atau hemat modal, yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan tenaga kerja atau input modal yang sama
- c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kondisi ekonomi suatu Negara berubah secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi, para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999).

Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pertumbuhan ekonomi pada suatu proses, bukan suatu gambaran pada suatu saat. Proses ini merupakan aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Ada 3 (tiga) aspek dalam definisi tersebut diantaranya proses, output perkapita, dan jangka panjang.

Aspek pertama pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran pada suatu saat. Dapat dilihat bahwa suatu perekonomian memiliki aspek dinamis, yang artinya perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu

Aspek kedua pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus di analisa dengan melihat output total disatu pihak dan jumlah penduduk di lain pihak.

Aspek ketiga bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki waktu yang panjang. Kenaikan output perkapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output perkapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Suatu pertumbuhan ekonomi tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mengalami kenaikan output perkapita.

2.2.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2006), ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Akumulasi modal, meliputi bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia
2. Pertumbuhan penduduk yang pada tahun – tahun berikutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja
3. Kemajuan teknologi.

Sukirno (2004), menerangkan beberapa faktor penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Hal yang termasuk dalam kekayaan alam meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hutan dan hasil laut, serta jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat

2. jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi

3. barang – barang modal dan teknologi

Barang – barang modal yang bertambah dan teknologi yang modern memegang peranan penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi

4. sistem ekonomi dan sikap masyarakat

Sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat tentunya mendorong terjadinya proses pertumbuhan ekonomi, serta didorong dengan sikap masyarakat yang mau hidup berkembang

2.2.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2.2.5.1 Teori Klasik

- a. Teori Adam Smith

Adam smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yaitu masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, masa berdagang dan masa perindustrian. Masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Pertumbuhan ekonom akan terpacu dengan

adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Pembagian kerja diandang sebagai upaya meningkatkan produktifitas tenaga kerja.

Menurut teori Adam Smith ini modal merupakan peranan penting yang akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu Negara. Akumulasi modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat. Di lain sisi kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber daya yang ada, artinya orang yang mampu menabung pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang menguasai dan mengusahakan sumber – sumber ekonomi yaitu para pengusaha dan tuan tanah.

Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.

b. David Ricardo

Teori pertumbuhan klasik mengalami pengembangan lebih lanjut berupa penjabaran model pertumbuhan menjadi suatu model yang lebih tajam, baik dari konsep yang dipakai maupun dalam mekanisme proses pertumbuhan itu sendiri. Dalam teori ini proses pertumbuhan dan kesimpulan – kesimpulan umum yang ditarik tidak terlalu beda dengan teori Adam Smith

David Ricardo menganggap jumlah produksi tanah (sumber – sumber alam) tidak bisa bertambah sehingga akan bertindak sebagai faktor pembatas dalam

proses pertumbuhan suatu masyarakat (Boediono, 1985). Adapun ciri – ciri perekonomian Ricardo, yaitu:

- a. Tanah terbatas jumlahnya
- b. Tenaga kerja (penduduk) yang meningkat atau menurun sesuai dengan apakah tingkat upah di atas atau dibawah tingkat minimal oleh Ricardo disebut dengan tingkat upah alamiah
- c. Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada diatas tingkat kuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik melakukan investasi
- d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi
- e. Sektor pertanian dominan

Dengan terbatasnya tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menghasilkan produk marjinal (*marginal product*) yang semakin menurun. Ini adalah hukum produk marjinal yang dikenal dengan nama *the law of diminishing return*. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut tidak bisa menerima tingkat upah di atas (tingkat upah alamiah), maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah dan ini akan menurunkan lagi produk marjinal tenaga kerja, selanjutnya menekan ke bawah tingkat upah.

The law of dimishing return berbunyi “ apabila salah satu input tetap, sedang input – input lain ditambah penggunaannya (variabel), maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input variabel tersebut mula – mula menaik, akan tetapi kemudian seterusnya menurun apabila input variabel tersebut bertambah (Boediono, 1985:18)

c. Arthur Lewis

Boediono (1985:35), model Lewis terkenal dengan nama “model pertumbuhan dengan suplai tenaga kerja yang tak terbatas”. Pokok permasalahan yang dikaji oleh Lewis adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian 2 (dua) sektor, yaitu:

- a. Sektor tradisional, dengan produktifitas rendah dan sumber tenaga kerja yang melimpah
- b. Sektor modern, dengan produktifitas tinggi dan sebagai sumber akumulasi kapital

Pada sektor modern mempunyai sejumlah stok barang capital tertentu, sektor ini menggunakan tenaga kerja yang diberi upah dengan marjinal produknya dengan stok kapital tersebut. Sektor tradisional berarti tingkat upah di sector ini berbeda pada tingkat substansi (hal ini sejalan dengan Smith dan Ricardo), dan pada tingkat upah ini suplai tenaga kerja yang bersedia bekerja melimpah, artinya apabila seorang pengusaha yang bersedia memperkejakan buruh pada tingkat substansi, maka dapat memperoleh jumlah buruh berapapun yang dibutuhkan (Boediono, 1985:37)

2.2.5.2 Teori Modern

a. Harold – Domar

Menurut teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod bahwa pertumbuhan ekonom masyarakat ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau Negara tersebut juga akan rendah. Intinya adalah adanya asumsi bahwa masalah

pembangunan merupakan masalah penambahan investasi modal. Sedangkan masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Jika ada penyertaan modal diinvestasikan hasilnya adalah terwujudnya pembangunan ekonomi. Teori ini berlandaskan pada penambahan investasi, dapat pula ditafsirkan bahwa semakin besar hutang luar negeri, maka semakin mantaplah pembangunan yang dijalankan.

Teori ini berpendapat bahwa akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi memiliki peran ganda, yaitu menciptakan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi. Untuk mempertahankan keseimbangan pada tingkat *full employment* diperlukan pengeluaran berupa investasi untuk menyerap kenaikan output yang terjadi sesuai dengan pertambahan penduduk untuk menjaga agar pendapatan perkapita tidak turun. Semakin besar pendapatan nasional, investasi yang dibutuhkan juga makin besar.

b. Solow – Swan

Model Solow – Swan memusatkan perhatian pada bagaimana pertumbuhan produk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kerangka umum dari model Solow – Swan dengan model Harold – Domar, tetapi model Solow – Swan lebih luas karena:

- 1) Menghindari masalah kestabilan yang merupakan ciri *warranted rate of growth* dalam model Harold – Domar
- 2) Lebih luwes digunakan untuk menjelaskan distribusi pendapatan.

Keluwesan ini terutama disebabkan karena Solow – Swan menggunakan bentuk produksi yang lebih mudah dimanipulasi secara aljabar (Boediono, 1985:81)

Garis besar proses pertumbuhan yang dibayangkan oleh Solow – Swan yaitu ada 4 (empat) tanggapan yang melandasi model neo-klasik (Boediono, 1985:83), yaitu:

- 1) Tenaga kerja (penduduk) tumbuh dengan laju tertentu
- 2) Adanya fungsi produksi yang berlaku setiap periode
- 3) Adanya kecenderungan untuk menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi dari output
- 4) Semua tabungan di investasi

2.2.6 Hipotesis Kuznets

Simon Kuznets (1995) dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik, bahwa mula – mula ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkatan pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Hasil penelitian Sutarno dan Mudrajad kuncoro (2003) menunjukkan kurva berbentuk U terbalik, dimana pada pertumbuhan awal ketimpangan memburuk dan pada tahap – tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali.

Analisis Kuznets (Todaro, 2006) menyatakan bahwa pertumbuhan di Negara – Negara maju tidak menyebabkan Negara – Negara berkembang ikut tumbuh, hal ini dikarenakan Negara berkembang tidak mampu mengikuti

pertumbuhan Negara – Negara maju tersebut, sehingga terjadilah kesenjangan antar Negara maju dengan Negara berkembang dalam pertumbuhan ekonominya. Kritik utama terhadap kurva Kuznets adalah hasilnya sangat sensitive terhadap ukuran *inequality* dan pemilihan set data. Dengan melakukan pemilihan yang berbeda, seseorang bisa mendapatkan kurva “U”, kurva “U” terbalik, atau tidak ada hubungan sama sekali.

2.2.7 Definisi Ketimpangan

Ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan maksimum, kekayaan hanya dimiliki satu orang saja dan tingkat ketimpangan sangat tinggi (Kuncoro,1997). Ketimpangan muncul seiring dengan proses pembangunan. Berdasarkan hipotesis Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan disuatu Negara pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terus terjadi sampai ketimpangan mencapai titik puncak, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur ketimpangan pembangunan antarwilayah akan menurun.

Adelman dan Moris berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan didaerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran Negara, sumber daya, dan kebijakan yang dianut. Faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997)

2.2.7.1 Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah

Menurut Sjafrizal (2012), ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi

demografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Adapun faktor – faktor terjadinya ketimpangan:

- Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang tinggi dapat memproduksi barang – barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah yang sumber daya alam nya rendah. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi, pada daerah sumber daya alam tinggi maka pertumbuhan ekonominya menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang sumber daya alam nya rendah.

- Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan ini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, dan kondisi ketenagakerjaan. Daerah yang mempunyai kondisi demografis yang baik cenderung mempunyai produktifitas kerja yang tinggi yang bisa menyebabkan mendorong peningkatan investasi yang dimana dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut

- Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Merupakan pergerakan perdagangan barang dan jasa antar daerah. Apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya ketimpangan

pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

- Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah

- Alokasi dana pembangunan antar daerah

Investasi merupakan factor penentu dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat lebih banyak menarik investasi pemerintah dan swasta, sehingga dapat mendorong pembangunan daerah melalui penyediaan tenaga kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Alokasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Sistem pemerintah yang dianut sekarang adalah otonomi, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar daerah akan cenderung rendah.

Sebaliknya dengan investasi swasta yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Hal yang banyak menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keuntungan lokasi tersebut ditentukan oleh transportasi, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan

sewa tanah. Karena itulah investasi swasta lebih banyak di daerah perkotaan daripada di pedesaan yang dapat menyebabkan kota lebih cepat tumbuh dibandingkan pedesaan.

2.2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi/usaha di suatu periode tertentu. Ada tiga pendekatan untuk menghitung angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yaitu:

1. Pendekatan Produksi, dimana jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit produksi dikelompokkan menjadi 9 sektor lapangan usaha, yaitu:
 - a. Pertanian
 - b. Pertambangan dan penggalian
 - c. Industry pengolahan
 - d. Listrik, gas, dan air bersih
 - e. Bangunan
 - f. Perdagangan, hotel dan restoran
 - g. Pengangkutan dan komunikasi
 - h. Jasa keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
 - i. Jasa – jasa

2. Pendekatan pengeluaran, yang merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
 - b. Konsumsi pemerintah
 - c. Pembentukan modal domestik bruto
 - d. Perubahan stok
 - e. Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (satu tahun)
3. Pendekatan pendapatan, merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah gaji dan upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menggunakan 2 macam harga, yaitu PDRB atas harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB Atas Harga Berlaku menggambarkan nilai – nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut. PDRB Atas Harga Berlaku juga digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB Atas Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar. PDRB Atas Harga Konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, serta untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sektor dari tahun ke tahun

Manfaat yang di dapat dari perhitungan PDRB adalah

- Mengetahui golongan perekonomian suatu Negara atau daerah. Apakah suatu Negara atau daerah tersebut termasuk pertanian atau perindustrian atau bahkan jasa
- Untuk mengetahui perbandingan tingkat kemakmuran dari tahun sebelumnya yang menghitung semua sumber yang mendatangkan hasil. Semakin tinggi nilai pendapatan nasional maka semakin tinggi tingkat kemakmuran Negara atau wilayah, begitupun sebaliknya.

2.2.9 Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno (2010), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah dapat dihitung dengan

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

Ada empat kelompok penyebab terjadinya pengangguran menurut (Sukirno, 2010):

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran rendah sementara pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong pekerja meninggalkan pekerjaan lama dan mencari

pekerjaan yang baru. Dalam proses mencari kerja baru inilah digolongkan sebagai pengangguran friksional

b. Pengangguran siklikal

Pengangguran yang diakibatkan adanya kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, yang disebabkan kondisi geografis, informasi, dan dari proses perekrutan yang panjang

c. Pengangguran struktural

Pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian yang umumnya Negara berusaha mengembangkan perekonomian dalam mengembangkan perekonomian dalam agraris ke industri

d. Pengangguran teknologi

Pengangguran yang disebabkan adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin dan kemajuan teknologi. Hal ini dapat ditimbulkan dari adanya pergantian penggunaan teknologi tradisional menjadi teknologi yang terbaru.

Berdasarkan ciri pengangguran, pengangguran dibagi dalam empat kelompok (Sadono Sukirno, 2010):

a. Pengangguran terbuka

Terbentuk pengangguran terbuka ini akibat dari penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sehingga membuat lebih banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan maka daripada itu pengangguran ini dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka

ini bisa disebabkan akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi tenaga kerja atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri

b. Pengangguran tersembunyi

Pada dasarnya pengangguran ini banyak terdapat di sektor pertanian dan jasa. Di banyak Negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c. Pengangguran bermusim

Pengangguran yang diakibatkan dari perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Biasanya pengangguran ini terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Misalnya pada musim kemarau para petani tidak bisa menggarap tanahnya serta para petani juga tidak bisa begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Sehingga pada masa tersebut para petani tidak melakukan pekerjaan lain sehingga mereka terpaksa menganggur.

d. Setengah menganggur

Biasanya pengangguran ini disebut dengan *under unemployment*. Pada dasarnya setengah menganggur tenaga kerja yang bekerja, akan tetapi bila diukur dari jam kerja, pendapatan, produktifitas dan jenis pekerjaan tidak

optimal. Pengangguran ini bekerja dengan jam kerja di bawah dari jam kerja normal, atau kurang dari 35-40 jam perminggunya.

2.2.10 Pengeluaran Pemerintah

Peran pemerintah dalam perekonomian dapat diklarifikasi dalam empat macam peran, yaitu: peran alokasi, peran distribusi, peran stabilisasi dan peran dinamisasi. Peran pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan fiskal. Menurut McEachern (2000), kebijakan fiskal menggunakan belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak dan pinjaman untuk mempengaruhi makroekonomi.

Stabilitas perekonomian dapat dicapai apabila pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Artinya pemerintah hanya mampu memelihara angkata kerja tinggi (pengangguran rendah), tingkat harga yang stabil, tingkat suku bunga yang wajar dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Jika perekonomian stabil maka bisa terciptanya kesejahteraan sesuai dengan harapan masyarakat (Soediyono, 1992:92)

Indonesia sendiri baru mulai menerapkan sistem desentralisasi pada tahun 2001 dengan menerapkan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang diperbaharui UU No. 32 dan 33 Tahun 2004. Dengan demikian telah terjadi perubahan struktural, dimana pada era sebelumnya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sentralistik. Tujuan perubahan dari sentralistik menjadi desentralistik adalah untuk membentuk dan membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik lokal yang semakin efektif dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

Dengan pelaksanaan desentralisasi maka pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana – rencana pembangunan yang telah disetujui dalam APBD. Akan tetapi setiap pemerintah daerah harus mampu mengkoordinasi pembangunan – pembangunan yang dilaksanakan agar dapat mengurangi masalah ketimpangan pembangunan wilayah.

2.2.10.1 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah di Indonesia menjadi sumber pembiayaan program – program sosial, juga berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan permintaan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Sumber dana berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah, sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Pengeluaran pemerintah apabila dilihat dari jenis kegiatan berdasarkan Permendagri no. 13 Tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja barang modal. Adanya anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output

yang dihasilkan. Sebagian besar komponen belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program

2. Belanja tidak langsung

Belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

2.2.11 Investasi

Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu perusahaan, baik penanaman modal tersebut bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Dengan adanya penambahan investasi ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Semakin besar investasi yang digunakan untuk produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Sukirno, 1985)

Menurut Mankiw (2007), investasi dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu *business fixed investment*, *residential investment*, dan *inventory investment*. *Business fixed investment* mencakup peralatan dan sarana yang digunakan perusahaan dalam proses produksinya, sementara *residential investment* meliputi

pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemilik sendiri maupun yang akan disewakan kembali, sedangkan *inventory investment* adalah barang yang disimpan perusahaan di gudang, meliputi bahan baku, persediaan, bahan setengah jadi dan barang jadi.

Investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi yang dilakukan pihak swasta dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi swasta dibagi menjadi dua yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dalam Undang – undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal asing didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri dengantujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha dalam negeri, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.12 Hubungan Variabel Bebas (Independen) dengan Variabe Mengikat (Dependen)

2.2.12.1 Hubungan Pengangguran dengan Ketimpangan Pembangunan

Kondisi geografis sangat berkaitan dengan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Menurut Sjafrizal (2012), faktor –

faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah salah satunya adalah karena perbedaan kondisi demografis. Demografis ini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk didalamnya tingkat pengangguran. Daerah yang kondisi demografisnya baik akan mempunyai produktifitas kerja yang lebih tinggi sehingga akan mendorong peningkatan investasi kedaerah yang bersangkutan. Menurut Lessman (2006) tingkat pengangguran yang tinggi berhubungan dengan semakin tingginya ketimpangan wilayah.

2.2.12.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Ketimpangan Pembangunan

Peran pemerintah yang tercermin dalam pengeluaran pemerintah merupakan factor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikan perekonomian melalui program – program kegiatan untuk mendorong produktifitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah.

2.2.12.3 Hubungan investasi dengan ketimpangan pembangunan

Investasi berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin banyaknya investasi yang masuk ke dalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan output yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa

yang meningkat akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut mendapatkan upah dan mempunyai daya beli. Menurut Sadono Sukirno (1985) semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang, dimana tenaga kerja lebih banyak diserap sehingga bisa terjadi pemerataan pendapatan perkapita.

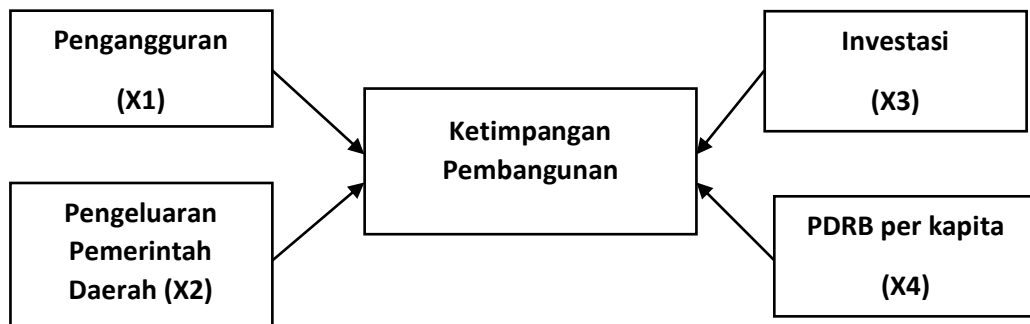
Menurut Sjafrizal (2008), kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Menurut Myrdal (Jhingan, 1993), investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Daerah – daerah yang sedang berkembang pasti memiliki permintaan barang dan jasa yang tinggi akan mendorong naiknya investasi yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Sebaliknya pada daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Pada dasarnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar.

2.2.12.4 Hubungan PDRB dengan ketimpangan pembangunan

Menurut Kuncoro (1997) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Menurut Simon Kuznets (1995) dalam Kuncoro (2002) mengenai kurva “U” terbalik bahwa mula – mula pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin tidak merata,

namun setelah mencapai suatu tingkatan pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependent (terikat) dapat dilihat pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.2.13 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
2. Diduga belanja daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
3. Diduga investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
4. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. Data yang diperlukan antara lain data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas harga konstan, jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran pemerintah daerah, dan investasi masing – masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3.2 Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan model analisis ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dengan menggunakan analisis indeks ketimpangan Williamson yang dimana untuk menentukan seberapa besar ketimpangan pembangunan antar daerah. Penelitian ini juga menggunakan regresi data panel dengan model *REM (Random Effects Model)* untuk mengetahui apakah variabel independent (pengangguran, pengeluaran pemerintah daerah, investasi, PDRB per kapita) mempengaruhi variabel dependen (ketimpangan) antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3.3 Indeks Williamson

Untuk menganalisis indeks ketimpangan Williamson dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2011 – 2015. Adapun

persamaan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) atau yang dinamakan dengan indeks ketimpangan Williamson adalah sebagai berikut (Mudrajad Kuncoro, 2004:133)

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot F_i/n}}{Y}$$

Keterangan:

Iw: Indeks Williamson

Y_i: PDRB per kapita di kabupaten/kota I (Rupiah)

Y: PDRB per kapita rata – rata seluruh daerah (Rupiah)

F_i: Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota (Jiwa)

N: Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat (Jiwa)

Dengan indikator apabila indeks ketimpangan Williamson mendekati nol, maka menunjukkan bahwa ketimpangan semakin kecil dan bila indeks menunjukan semakin jauh dari nol maka ketimpangan semakin lebar atau tinggi. Secara ilmu statistik, indeks Williamson ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan.

3.4 Regresi Panel Data

Pada penelitian penulis menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan dengan menggunakan *Eviews 8*, alasannya karena peneliti ingin melakukan observasi terhadap berbagai daerah dalam berbagai waktu yang berbeda. Sehingga analisis panel data merupakan penggabungan antara deret waktu (*time series*) dan banyaknya variabel (*cross section*). Menurut (Widarjono, 2009:250) data panel merupakan data gabungan dari data *time series* dan data *cross section*, maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

$I = 1, 2, \dots, N$

$t = 1, 2, \dots, N$

dimana:

Y: indeks ketimpangan

X1: pengangguran (jiwa)

X2: belanja daerah (Ribuan Rupiah)

X3: investasi (Juta Rupiah)

X4: PDRB per kapita (Rupiah)

N: banyaknya observasi

T: banyaknya waktu

N dan T : banyaknya data panel

Dalam analisis, ada dua macam pendekatan data panel yang terdiri dari pendekatan efek tetap (*fixed effects*) dimana dengan asumsi bahwa intersep maupun sloponya sama baik antara waktu maupun individu atau perusahaan, dan pendekatan acak (*random effects*). Kedua pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Metode *Common Effects*

Merupakan metode paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu dengan mengombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Diasumsikan metode ini bahwa perilaku data antara ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya dalam bentuk linier adalah sebagai berikut

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.4.2 Metode *Fixed Effects*

Merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara variabel independen namun intersepanya sama antar waktu (*time invariant*). Model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar daerah dan antar waktu

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \sum_{j=1}^{r=13} \alpha_j D_j + e_{it}$$

3.4.3 Metode *Random Effects*

Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap Kabupaten/Kota mempunyai intersep. Namun demikian diasumsikan bahwa intersep adalah variabel random. Model *random effects* ditulis dalam model regresi linier sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.5 Pemilihan Model dalam Pengolahan data

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan berdasarkan pertimbangan statistik. Tujuannya adalah untuk memperoleh dugaan yang efisien. Untuk menentukan model manakah yang paling tepat dapat digunakan untuk penelitian ini akan digunakan pengujian yang formal yaitu *Chow Test* dan *Hausmann Test*.

3.5.1 Uji Chow Test

Uji *Chow Test* dilakukan apakah model yang digunakan *pooled least square* atau *fixed effect*. Hipotesis dari *chow test* adalah:

H_0 : F stat < F table, maka model PLS yang valid digunakan

H_1 : F stat > F table, maka model *fixed effect* yang valid digunakan

Apabila nilai *chow* statistik (F statistik) dari hasil pengujian lebih kecil dari F -tabel, maka hipotesis nol diterima. Sehingga model yang akan diterima dan digunakan adalah model PLS, begitu juga sebaliknya

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan F – statistik seperti yang dirumuskan oleh *chow*:

$$Chow = \frac{(RRSS - URSS)/(N - 1)}{URSS/(NT - N - K)}$$

Keterangan:

RRSS : Restricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode Pooled Least Square/ Common Intercept)

URSS : Unstresticted Residual Sum Square (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel metode *Fixed Effect Model*)

N : Jumlah data cross section

T : Jumla data time series

K : Jumlah variabel penjelas

3.5.2 Uji Hausman test

Uji Hausman merupakan uji tentang pemilihan metode mana yang terbaik diantara *fixed effect* dan *random effect*. Uji ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu *Eviews 8*. Adapun persamaan kovarian matrik sebagai berikut:

$$\text{var}[\beta_{OLS} - \beta_{GLS}] = \text{var}(\beta_{OLS}) - \text{var}(\beta_{GLS}) = \text{var}(q)$$

Mengikuti kriteria Wald, uji Hausman akan mengikuti distribusi *chi-squares* sebagai berikut:

$$m = q' \text{var}(q)^{-1} q$$

Dimana $q = [\beta_{OLS} - \beta_{GLS}]$ dan $\text{var}(q) = \text{var}(\beta_{OLS}) - \text{var}(\beta_{GLS})$

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis maka menolak hipotesis nol, sehingga model yang tepat adalah *fixed effect*, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis maka gagal menolak hipotesis nol, sehingga model yang tepat adalah *random effect* (Widarjono 2013). Hipotesis uji *Hausman test*:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Jika nilai Hausman *test* (χ^2 statistik) hasil pengujian lebih besar dari χ^2 tabel, maka hipotesis nol ditolak sehingga model yang akan diterima dan digunakan adalah model *fixed effect* dan sebaliknya.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Widarjono (2013), pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi dengan datanya atau mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresinya, karena mampu menjelaskan data aktualnya. Sebaliknya jika semakin mendekati angka nol maka garis regresinya kurang baik.

Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel – variabel independen. Sebaliknya jika semakin kecil nilai R^2 , maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Apabila R^2 bernilai 0 maka tidak ada hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen.

3.6.2 Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Bersama – sama)

Uji F merupakan sebuah uji yang dimana mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model regresinya adalah

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Sehingga untuk menguji koefisien dari variabel independen apakah berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama – sama atau menyeluruh maka di buat hipotesis:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

H_a : paling tidak terdapat satu β tidak sama dengan nol

Dasar menentukan apakah variabel independen berpengaruh bersama – sama atau menyeluruh dapat di cari dengan formula sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R^2)/(n - k)} \sim F_{[(k-1),(n-k)]}$$

Jika F hitung $< F$ table, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara bersama – sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Begitu juga sebaliknya, jika F hitung $> F$ table, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara bersama – sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Memandingkan dengan probabilitasnya, maka probabilitas pada derajat keyakinan 5% maka bila probabilitas < 0.05 , berarti variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, bila probabilitas > 0.05 , maka variabel independen secara bersama – sama tidak mempengaruhi variabel terhadap variabel dependen secara signifikan. Adapun hipotesis yang digunakan:

3.6.3 Uji t (Pengujian variabel secara individu)

Uji t merupakan pengujian masing – masing variabel independen apakah secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari t hitung dengan t table atau dapat juga dilakukan dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan tertentu. Adapun model regresinya adalah sebagai berikut”

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Sehingga dapat kita buat hipotesis masing – masing variabel nya:

- X1 (Pengangguran)

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 > 0$$

- X2 (Belanja Daerah)

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 < 0$$

- X3 (Investasi)

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 < 0$$

- X4 (PDRB per kapita)

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 < 0$$

- Dimana :

$\beta_1, \beta_4 > 0$ “berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan”

$\beta_2, \beta_3 < 0$ “berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan”

Jika t hitung $<$ t table, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, jika t hitung $>$ t table, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan

Apabila membandingkan dengan probabilitasnya pada derajat keyakinan 5% maka bila probabilitas $<$ 0.05, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya bila probabilitas $>$ 0.05, berarti independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks ketimpangan Williamson ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah, dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan melihat tingkat pemerataan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita antar Kabupaten/Kota. Apabila nilai Indeks Williamson mendekati nol maka menunjukkan bahwa ketimpangan semakin kecil atau semakin merata, sedangkan apabila menjauhi nol menunjukkan bahwa ketimpangan semakin melebar. Adapun nilai Indeks ketimpangan Williamson pada table 4.1 berikut :

Tabel 4. 1

**Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kalimantan Barat
2011 – 2015**

Tahun	Indeks Williamson
2011	0.262
2012	0.267
2013	0.272
2014	0.271
2015	0.271
Rata – Rata	0.269

Sumber : Lampiran Indeks Williamson

Pada hasil tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa rata – rata ketimpangan PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2011-2015 mencapai 0.269. Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di

Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2011 – 2015 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 nilai indeks ketimpangan Williamson sebesar 0.262 dan naik menjadi 0.267 pada tahun 2012. Begitu juga seterusnya dari tahun ke tahun. Apabila dilihat secara umum nilai indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kalimantan Barat memang mengalami kenaikan akan tetapi kenaikan tersebut tidak naik secara signifikan.

Nilai indeks ketimpangan Williamson di Provinsi Kalimantan Barat jika dilihat secara rata – rata tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita antar Kabupaten/Kota mengalami ketimpangan yang relatif rendah, ini dapat dilihat dari nilai ketimpangan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2011-2015.

4.2 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011 – 2015, ketimpangan pembangunan sebagai *dependent variable* dan *independent variabel* terdiri dari variabel pengangguran, belanja daerah, investasi swasta, dan PDRB.

1. Y adalah ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
2. X_1 adalah jumlah pengangguran (Jiwa) Kabupaten/Kota
3. X_2 adalah belanja daerah (Ribuan Rupiah) Kabupaten/Kota
4. X_3 adalah realisasi investasi (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota
5. X_4 adalah PDRB per kapita (Rupiah) Kabupaten/Kota

4.3 Uji menentukan Model Panel

4.3.1 Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Common Effects* atau model estimasi *Fixed Effects*, dengan uji hipotesis:

1. H_0 : memilih menggunakan model estimasi *Common Effects*
2. H_a : memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effects*

Uji ini dilakukan dengan melihat $p - value$, apabila $p - value$ signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi *Fixed Effects*, sebaliknya bila $p - value$ tidak signifikan (lebih besar dari 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi *Common Effects*

Tabel 4. 2

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: PANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistik	d.f.	Prob.
Cross-section F	363.866547	(13,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	316.499811	13	0.0000

Sumber: Olahan Data Eviews

Dari hasil perhitungan F-hitung diatas adalah 363.866547 dan nilai F-kritis dengan numerator 13 dan denominator 52 pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah 2.08. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-kritis, sehingga menolah hipotesis nul sehingga model panel data yang tepat digunakan adalah *fixed effects* dibandingkan dengan *common effects*.

4.3.2 Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *fixed effects* atau model estimasi *random effects*, dengan uji hipotesis:

1. Ho : memilih menggunakan model estimasi *Random Effects*
2. Ha : memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effects*

Uji ini dilakukan dengan melihat *p – value*, apabila *p – value* signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi *Fixed Effects*, sebaliknya bila *p – value* tidak signifikan (lebih besar dari 5%) maka model yang digunakan adalah *Random Effects Model*

Tabel 4. 3

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: PANEL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.134555	4	0.2738

Sumber: Olahan Data Eviews

Berdasarkan pengujian Hausman yang telah dilakukan maka di peroleh nilai *chi – squares* uji Hausman sebesar 5.134555 dan nilai *chi – squares* kritis diperoleh dengan derajat kebebasan 4 pada tingkan signifikasi $\alpha = 5\%$ adalah 9.24. Hal ini menunjukan nilai *chi – squares* uji hausman lebih kecil dibanding nilai *chi – squares* kritis sehingga menerima hipotesis nul. Sehingga berdasarkan uji hausman tersebut model yang lebih tepat digunakan adalah metode *Random Effects*.

Tabel 4. 4**Hasil Estimasi Random Effects Model**

Sample: 2011 2015
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 14
 Total pool (balanced) observations: 70
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-0.002792	0.015831	-0.176361	0.8606
X1?	-9.28E-08	2.51E-07	-0.370216	0.7124
X2?	-1.05E-11	4.68E-12	-2.248856	0.0279
X3?	-2.34E-09	9.49E-10	-2.465142	0.0163
X4?	3.46E-09	7.18E-10	4.822352	0.0000
Random Effects (Cross)				
_SMBS--C	-0.038884			
_BKY--C	-0.030470			
_LNDK--C	0.033162			
_PTK--C	0.019914			
_SNGGAU--C	-0.014982			
_KTP--C	0.035838			
_SNTG--C	-0.012813			
_KH--C	-0.045186			
_SKDAU--C	-0.002527			
_MLWI--C	0.032609			
_KU--C	-0.040052			
_KR--C	-0.005305			
_KOTAPTK--C	0.099663			
_KOTASKW--C	-0.030967			

Sumber: data diolah

$$Y_{it} = -0.002792 - 9.28 X_{1it} - 1.05 X_{2it} - 2.34 X_{3it} + 3.46 X_{4it} + U_{it}$$

Keterangan:

Y = Indeks Williamson

β_0 = koefisien intersep

β_1 = koefisien X1 (Pengangguran)

β_2 = koefisien X2 (Belanja Daerah)

β_3 = koefisien X3 (Investasi)

β_4 = koefisien X4 (PDRB per kapita)

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.5

Uji Determinasi

R-square	0.302577
Adjusted R-squared	0.259658
S.E. of regression	0.004023
F-statistik	7.050047
Prob(F-statistik)	0.000089

Sumber: data diolah

Hasil regresi yang telah dilakukan, variabel pengangguran, belanja daerah investasi dan PDRB per kapita terhadap ketimpangan pembangunan diperoleh nilai R^2 untuk sebesar 0.302577 atau 30%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel ketimpangan sebesar 30% dapat dijelaskan oleh variasi variabel di dalam model, sedangkan sisanya 70% dijelaskan oleh variabel lain di luar model tersebut.

4.4.2 Uji F (Uji Koefisien Regresi secara Bersama – sama)

Tabel 4.6

Hasil Uji F

R-square	0.302577
Adjusted R-squared	0.259658
S.E. of regression	0.004023
F-statistik	7.050047
Prob(F-statistik)	0.000089

Sumber: data diolah

Dari hasil regresi yang telah dilakukan maka diperoleh nilai F – hitung sebesar 7.050047 dan nilai F – tabel yang di peroleh sebesar 2.53 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, nilai itu diperoleh dengan numerator (k-1) atau $5 - 1 = 4$ dan denominator (n-k) atau $70 - 5 = 65$. Sehingga F – hitung > F – tabel, yang artinya

bahwa variabel pengangguran, belanja daerah, investasi dan PDRB per kapita secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.4.3 Uji t (Uji Variabel Secara Individu)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing – masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan $\alpha = 5\%$ dan degree of freedom (df) = 65, maka diperoleh nilai t – tabel 1.671

1. Koefisien Variabel Pengangguran (X1)

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 > 0$$

Untuk nilai t tabel uji satu sisi dengan derajat kebebasan 65 dan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh nilai sebesar 1.671. sedangkan untuk nilai t – hitung sebesar - 0.370216. berdasarkan hasil diatas maka dapat diketahui bahwa t – hitung < t – tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel pengangguran tidak mempengaruhi variabel ketimpangan pembangunan secara signifikan. Nilai probabilitas sebesar 0.7124 dengan $\alpha = 5\%$, yang dimana $0.7124 > 0.05$ berarti pengangguran tidak mempengaruhi ketimpangan pembangunan secara signifikan.

2. Koefisien Variabel Belanja Daerah (X2)

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 < 0$$

Untuk nilai t – tabel uji satu sisi dengan derajat kebebasan 65 dan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh nilai sebesar 1.671. Sedangkan nilai t – hitung sebesar -2.248856. berdasarkan hasil diatas maka dapat diketahui bahwa t – hitung > t – tabel, maka

H_0 ditolak sehingga menerima H_a . Artinya variabel belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Selain itu nilai probabilitas sebesar 0.0279 dengan $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti $0.0279 < 0.05$ yang artinya pengangguran berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

3. Koefisien Variabel Investasi (X3)

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 < 0$$

Untuk nilai t – tabel uji satu sisi dengan derajat kebebasan 65 dan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh nilai sebesar 1.671. Sedangkan nilai t – hitung sebesar -2.465142. Berdasarkan hasil diatas maka dapat diketahui bahwa t – hitung > t – tabel, maka H_0 ditolak sehingga menerima H_a . Artinya variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Selain itu nilai probabilitasnya sebesar 0.0163 dengan $\alpha = 5\%$ yang berarti $0.0163 < 0.05$ yang artinya investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan

4. Koefisien Variabel PDRB Perkapita (X4)

$$H_0 : \beta_4 \geq 0$$

$$H_a : \beta_4 < 0$$

Untuk nilai t – tabel uji satu sisi dengan derajat kebebasan 65 dan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh nilai sebesar 1.671. Sedangkan untuk nilai t – hitung sebesar 4.822352. berdasarkan hasil diatas maka dapat diketahui bahwa t – hitung > t – tabel, maka H_0 ditolak sehingga menerima H_a . Artinya variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Selain itu probabilitasnya sebesar 0.0000 dengan $\alpha = 5\%$ yang berarti $0.0000 < 0.05$ yang

artinya PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Tabel 4.7
Uji t

Variabel	t - hitung	t – tabel	keterangan
Pengangguran (X1)	-0.370216	1.671	Tidak Signifikan
Belanja Daerah (X2)	-2.248856	1.671	Signifikan
Investasi (X3)	-2.465142	1.671	Signifikan
PDRB PerKapita (X4)	4.822352	1.671	Signifikan

Sumber: *Eviews 8*, data diolah

4.5 Hasil dan Pembahasan

Hasil olah data yang telah dilakukan dengan menggunakan program *eviews* dengan estimasi random effect model, maka dapat dilihat perbedaan dari 14 Kabupaten/Kota dengan melihat intersep dari masing – masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun table tersebut seperti dibawah ini:

Tabel 4.8
Intersep Masing-masing Daerah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Sudah Diurutkan	
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat	Intersep
_KOTAPTK—C	0.096871
_KTP—C	0.033046
_LNDK—C	0.03037
_MLWI—C	0.029817
_PTK—C	0.017122
_SKDAU—C	-0.005319
_KR—C	-0.008097
_SNTG—C	-0.015605
_SNGGAU—C	-0.017774
_BKY—C	-0.033262
_KOTASKW—C	-0.033759
_SMBS—C	-0.041676

_KU—C	-0.042844
_KH—C	-0.047978

Sumber : olahan data eviews

- $Y_{SMBS} = -0.038884 - 0.002792 - 9.28E-08 * X1_{SMBS} - 1.05E-11 * X2_{SMBS} - 2.34E-09 * X3_{SMBS} + 3.46E-09 * X4_{SMBS}$
- $Y_{BKY} = -0.030470 - 0.002792 - 9.28E-08 * X1_{BKY} - 1.05E-11 * X2_{BKY} - 2.34E-09 * X3_{BKY} + 3.46E-09 * X4_{BKY}$
- $Y_{LNDK} = 0.033162 - 0.002792 - 9.28E-08 * X1_{LNDK} - 1.05E-11 * X2_{LNDK} - 2.34E-09 * X3_{LNDK} + 3.46E-09 * X4_{LNDK}$
- $Y_{PTK} = 0.019914 - 0.002792 - 9.28E-08 * X1_{PTK} - 1.05E-11 * X2_{PTK} - 2.34E-09 * X3_{PTK} + 3.46E-09 * X4_{PTK}$
- $Y_{SNGGAU} = -0.014982 - 0.002792 - 9.28E-08 * X1_{SNGGAU} - 1.05E-11 * X2_{SNGGAU} - 2.34E-09 * X3_{SNGGAU} + 3.46E-09 * X4_{SNGGAU}$
- $Y_{KTP} = 0.035838 - 0.002792 - 9.28E-08 * X1_{KTP} - 1.05E-11 * X2_{KTP} - 2.34E-09 * X3_{KTP} + 3.46E-09 * X4_{KTP}$
- $Y_{SNTG} = -0.012813 - 0.002792 - 9.28E-08 * X1_{SNTG} - 1.05E-11 * X2_{SNTG} - 2.34E-09 * X3_{SNTG} + 3.46E-09 * X4_{SNTG}$
- $Y_{KH} = -0.045186 - 0.002792 - 9.28E-08 * X1_{KH} - 1.05E-11 * X2_{KH} - 2.34E-09 * X3_{KH} + 3.46E-09 * X4_{KH}$
- $Y_{SKDAU} = -0.002527 - 0.002792 - 9.28E-08 * X1_{SKDAU} - 1.05E-11 * X2_{SKDAU} - 2.34E-09 * X3_{SKDAU} + 3.46E-09 * X4_{SKDAU}$
- $Y_{MLWI} = 0.032609 - 0.002792 - 9.28E-08 * X1_{MLWI} - 1.05E-11 * X2_{MLWI} - 2.34E-09 * X3_{MLWI} + 3.46E-09 * X4_{MLWI}$

- $Y_{KU} = -0.040052 - 0.002792 - 9.28E-08*X1_{KU} - 1.05E-11*X2_{KU} - 2.34E-09*X3_{KU} + 3.46E-09*X4_{KU}$
- $Y_{KR} = -0.005305 - 0.002792 - 9.28E-08*X1_{KR} - 1.05E-11*X2_{KR} - 2.34E-09*X3_{KR} + 3.46E-09*X4_{KR}$
- $Y_{KOTAPTK} = 0.099663 - 0.002792 - 9.28E-08*X1_{KOTAPTK} - 1.05E-11*X2_{KOTAPTK} - 2.34E-09*X3_{KOTAPTK} + 3.46E-09*X4_{KOTAPTK}$
- $Y_{KOTASKW} = -0.030967 - 0.002792 - 9.28E-08*X1_{KOTASKW} - 1.05E-11*X2_{KOTASKW} - 2.34E-09*X3_{KOTASKW} + 3.46E-09*X4_{KOTASKW}$

Keterangan :

SMBS	: Sambas
BKY	: Bengkayang
LNDK	: Landak
PTK	: Pontianak
SNGGAU	: Sanggau
KTP	: Ketapang
SNTG	: Sintang
KH	: Kapuas Hulu
SKDAU	: Sekadau
MLWI	: Melawi
KU	: Kayong Utara
KR	: Kubu Raya
KOTAPTK	: Kota Pontianak
KOTASKW	: Kota Singkawang

Berdasarkan hasil regresi *Random Effects Model* yang telah dilakukan maka diperoleh nilai intersep dari masing – masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil regresi yang telah dilakukan memiliki koefisien intersep yang berbeda – beda di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa model estimasi ini mampu menunjukkan adanya perbedaan

perilaku 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi tersebut. Dapat dilihat nilai koefisien berdasarkan urutan terbesar sampai terkecil, dan kota yang memiliki indeks terbesar adalah Kota Pontianak dengan nilai 0.096871, artinya tingkat ketimpangan pembangunan paling tinggi berada di Kota Pontianak, dan yang memiliki indeks yang terkecil adalah Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai - 0.047978, artinya tingkat ketimpangan pembangunan paling rendah berada di Kabupaten Kapuas Hulu rendah

4.5.1 Analisis Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan

Pembangunan Antar Wilayah

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Korelasi antara pengangguran dengan ketimpangan antar wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat adalah negatif, yang artinya adalah apabila pengangguran naik maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini tidak sesuai dengan teori – teori ekonom yang ada, alasannya adalah orang yang menganggur pasti ada dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi dalam rumah tangga tersebut pasti ada orang yang bekerja dengan pendapatan yang tinggi sehingga cukup untuk menyokong pengangguran dalam rumah tangga tersebut.

4.5.2 Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan

Pembangunan Antar Wilayah

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/kota

yang ada di provinsi Kalimantan Barat. Artinya adalah apabila belanja daerah meningkat akan menurunkan ketimpangan antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Koefisien dari belanja pemerintah daerah adalah 1.05E-11. Artinya adalah jika belanja pemerintah daerah naik 1 satuan (dalam ribu) dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan, maka tingkat ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat akan turun sebesar 0,000000000000105

Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa belanja daerah memiliki hubungan negative terhadap ketimpangan. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Dhyatmika (2013), penelitiannya analisis ketimpangan pembangunan Provinsi Banten pasca pemekaran menggunakan data tahun 2001-2011 mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dapat menjadikan suntikan perekonomian melalui program – program atau kegiatan untuk mendorong produktifitas sumber daya yang ada di masing – masing daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

4.5.3 Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Hasil estimasi regresi random effect model menunjukkan bahwa investasi berpengaruh signifikan negative terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provnsi Kalimantan Barat. Artinya apabila investasi naik maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota

di Provinsi Kalimantan Barat akan turun. Koefisien dari investasi adalah $-2.34E-09$. Artinya adalah jika investasi naik 1 satuan (dalam juta) dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan, maka tingkat ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat akan turun sebesar 0,000000000234.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa investasi memiliki hubungan signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Budiantoro Hartono (2008), penelitiannya analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu tahun 1981-2005 mengatakan bahwa investasi swasta dengan ketimpangan pembangunan ekonomi menghasilkan hubungan yang negatif dan mengemukakan bahwa setiap peningkatan investasi swasta yang berarti peningkatan penanaman modal maka akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran sehingga ketimpangan akan berkurang.

4.5.4 Analisis Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Ketimpangan

Pembangunan Ekonomi

Hasil estimasi random effect model menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Artinya adalah apabila PDRB per kapita di suatu kabupaten/kota meningkat, maka akan meningkatkan juga ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Koefisien dari PDRB per kapita adalah $3.46E-09$. Artinya adalah jika belanja pemerintah daerah naik 1 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan, maka tingkat ketimpangan antar

wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat akan naik sebesar 0,000000000346.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa PDRB memiliki hubungan yang positif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Yuki Angelia (2010) penelitiannya analisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008 mengatakan bahwa hubungan positif antara PDRB per kapita dengan ketimpangan wilayah bisa disebabkan karena kenaikan pendapatan per kapita masyarakat DKI Jakarta belum terjadi secara merata. Negara – Negara berkembang dalam perekonomian lebih menekankan pada penggunaan modal dibandingkan penggunaan tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai analisis ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil perhitungan indeks Ketimpangan Williamson diketahui bahwa rata – rata ketimpangan selama periode tahun 2011-2015 mencapai nilai 0.269. ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun cenderung meningkat, akan tetapi peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan.
2. Pengangguran yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2015 berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Akan tetapi hasil dari estimasi random effect model bahwa pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan.
3. Belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2015 berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini menandakan bahwa belanja daerah setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat mendorong adanya kegiatan ekonomi melalui program – program yang dapat meningkatkan produktifitas sumber daya yang ada pada masing – masing daerah, sehingga berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

4. Investasi di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2015 berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Dengan adanya peningkatan investasi maka akan berdampak pada peningkatan modal dalam kegiatan ekonomi, sehingga dampak dari peningkatan investasi ini bisa menyebabkan juga peningkatan kemakmuran sehingga ketimpangan yang ada bisa berkurang
5. PDRB per kapita di gambarkan oleh laju PDRB per kapita atas harga konstan 2000 tahun 2011-2015 antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan berdampak positif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini menandakan bahwa karena tidak meratanya pendapatan perkapita yang diterima oleh masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hanya sebagian saja masyarakat yang dapat merasakan peningkatan pendapatan perkapita di Provinsi Kalimantan Barat.

5.2 Implikasi

Dari hasil penelitian ini dapat diimplikasikan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, antara lain : tingkat pengangguran, belanja daerah, investasi, dan PDRB per kapita. Dimana faktor – faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Implikasi yang dapat disampaikan atau temuan empiris dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan peran belanja daerah dari APBD yang ada di masing – masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan masing – masing daerah Kabupaten/Kota tersebut sudah mengetahui keunggulan masing – masing

daerah nya. Serta lebih bijaksana dalam penggunaan anggaran belanja daerah ini, sehingga bisa menjadikan sebuah suntikan – suntikan program unggulan demi mendorong produktifitas suatu wilayah tersebut. Sehingga daerah – daerah Kabupaten/Kota tersebut bisa bersaing dengan daerah lainnya.

2. Peran investasi harus lebih di tingkat lagi, terutama PMA yang masih kurang di beberapa daerah, karena dengan adanya investasi ini maka bisa meningkatkan atau mengembangkan daerah yang memiliki SDA serta keunggulan suatu daerah tersebut sehingga tidak tertinggal dengan daerah sekitar nya di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah juga harus turut membantu mengembangkan potensi – potensi yang ada di daerah tersebut, karena tanpa adanya bantuan dari peran pemerintah, maka investasi tentunya pasti tidak akan masuk ke daerah tersebut karena dianggap tidak memiliki potensi yang besar.
3. PDRB per kapita di setiap daerah kabupaten/kota masih belum merata. Hal ini dikarenakan masih banyak di daerah – daerah kabupaten/kota yang pengangguran nya lumayan tinggi sehingga pendapatn per kapita tidak merata di Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat serta pemerintah harus bisa bekerja sama, dalam artian peran pemerintah dalam menyediakan lowongan kerja setiap atau membuka bimbingan atau pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat untuk membuka usaha sendiri, dan masyarakat yang mau berusaha untuk bekerja dan lebih produktif, sehingga bisa meningkatkan pendapatannya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Ratih. (2010). "Disparitas Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 1996-1999 dan tahun 2004-2007". *Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. I, No. 2, Desember 2010, 123 – 134
- Asih, Widi. (2015), "Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013". *Skripsi* (dipublikasikan) Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Boediono. (1992). "*Teori Pertumbuhan Ekonomi*", BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. "*Kalimantan Barat Dalam Angka 2011-2015*". BPS Provinsi Kalimantan Barat, Diambil 12 Oktober 2016, dari www.kalbar.bps.go.id
-
- _____. "*Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa terbitan*". BPS Kalimantan Barat, Diambil 30 Oktober 2016, dari www.kalbar.bps.go.id
-
- _____. "*Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat 2012-2015*". BPS Provinsi Kalimantan Barat, Diambil 16 Oktober 2016, dari www.kalbar.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "*Rasio Gini Menurut Provinsi*". BPS Indonesia. Diambil 27 Februari 2017, dari <https://data.go.id/dataset/rasio-gini>
- Dhyatmika, Ketut Wahyu. (2013). "Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran". *Skripsi* (dipublikasikan). Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fadilia, Lia Maharani, (2008), "Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Pemekaran Di Sumatera Utara". *Skripsi* (dipublikasikan). Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hartono, Budiantoro. (2008). berjudul "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah". *Tesis* (dipublikasikan) Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Harun, Lukman & Ghozali Maski, (2011), "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Diakses pada 3 Desember 2016

- Jhingan M.L, (2012). “*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*”. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Lincoln, Arsyad (2004). “*Ekonomi Pembangunan*”: bagian penerbitan sekolah tinggi ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- _____ (1999). “*Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*”. Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, (2006). “*Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*”. UPPSTIM YKPN, Yogyakarta.
- Muhaimin, Ilham Farih, (2014). “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa”. *Skripsi* (tidak dipublikasikan), Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Yoga, (2014). “Ketimpangan Pembangunan Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2012”. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Priyanto, Andri, (2009). “Analisis Ketimpangan Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten”. *Skripsi* (dipublikasikan). Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat.
- Sjafrizal. (2012). “*Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*”. Badause Media, Padang.
- Sukirno, Sadono, (1985). “*Ekonomi Pembangunan*”. LPFE UI, Jakarta.
- _____ (2009),. “*Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*”. Jakarta: Raha Grafindo Persadan
- Tama, Rio Jaka, (2011). “Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007-2009”. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Widarjono, Agus. (2013). “*Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*”. edisi keempat. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

LAMPIRAN I

Data Penelitian

Kabupaten/ Kota	Tahun	Y_IW	X1_Peng ganggu ran	X2_Belanja Daerah	X3_Investasi	X4_PDRB per kapita
Kab Sambas	2011	0.0174	7.513	804.415.947,38	269.814,75	17.995.248,92
	2012	0.0160	8.046	814.295.338	466.432,06	18.810.634,23
	2013	0.0141	7.481	1.039.619.502	666.558,54	19.720.691,13
	2014	0.0105	10.097	1.174.144.328	749.618,93	20.613.364,89
	2015	0.0078	12.865	1.421.885.401	1.056.259,86	21.465.244,68
Kab Bengkayang	2011	0.0187	3.686	526.181.757,42	118.353,27	17.382.516,23
	2012	0.0191	3.563	541.669.729,00	381.803,38	18.058.265,50
	2013	0.0194	2.540	620.299.719,00	382.149,84	18.792.801,30
	2014	0.0217	4.166	806.042.638,00	2.497.930,89	19.204.696,40
	2015	0.0253	3.979	899.346.377,67	2.497.930,89	19.484.689,34
Kab Landak	2011	0.0717	5.480	318.095.071,43	191.744,92	14.011.595,71
	2012	0.0724	7.799	334.114.498,42	208.890,26	14.528.598,65
	2013	0.0738	5.150	827.393.254,98	223.853,07	15.037.272,66
	2014	0.0739	5.926	920.954.103,44	744.707,06	15.537.069,88
	2015	0.0729	10.306	1.209.213.551,20	1.603.690,62	16.115.828,54
Kab Pontianak	2011	0.0568	3.985	522.026.941,42	1.276.353,65	14.304.240,22
	2012	0.0594	5.190	589.639.052,18	1.222.459,64	14.656.781,76
	2013	0.0601	5.652	656.670.843,12	1.660.610,68	15.213.412,11
	2014	0.0583	6.357	758.034.429,62	1.778.241,12	15.893.564,03
	2015	0.0558	7.924	882.035.158,78	3.728.246,49	16.634.061,61
Kab Sanggau	2011	0.0488	7.140	730.900.732,68	2.691.666,60	22.021.662,24
	2012	0.0404	2.936	882.436.460,11	3.440.212,72	22.958.874,08
	2013	0.0494	1.612	989.383.319,00	3.937.092,88	23.930.255,03
	2014	0.0428	7.222	1.053.233.782,00	4.970.888,98	24.270.802,70
	2015	0.0380	12.125	1.055.361.142,61	5.319.076,95	24.719.703,61
Kab Ketapang	2011	0.1147	8.180	962.180.703,73	2.702.824,95	25.947.019,32
	2012	0.1091	4.179	1.202.764.205,12	3.440.212,72	26.638.394,80
	2013	0.1032	9.804	1.202.764.205,12	4.044.272,05	27.375.426,66
	2014	0.0933	4.746	1.577.793.986,14	4.479.579,34	27.616.785,39
	2015	0.0924	9.792	1.849.286.998,87	6.378.002,76	28.423.374,76
Kab Sintang	2011	0.0304	6.430	794.732.602,00	1.709.257,29	16.975.393,20
	2012	0.0310	4.157	920.004.348,00	1.842.422,56	17.631.170,04
	2013	0.0297	4.350	1.075.556.247,00	2.091.661,07	18.472.483,74
	2014	0.0288	6.563	1.141.361.438,00	3.637.731,99	19.159.012,17
	2015	0.0290	5.052	1.481.302.835,12	4.532.470,12	19.767.304,34

Kab Kapuas Hulu	2011	0.0051	2.999	833.905.523,23	2.047.181,50	19.409.416,68
	2012	0.0023	1.833	925.799.594,29	3.027.332,44	19.959.325,70
	2013	0.0004	2.371	1.046.895.749,87	3.713.249,06	20.629.396,90
	2014	0.0023	2.477	1.166.456.511,27	4.552.995,96	21.068.859,37
	2015	0.0044	3.888	1.421.570.042,81	4.903.917,48	21.550.904,85
Kab Sekadau	2011	0.0463	2.845	432.761.758,00	41.308,61	14.648.249,90
	2012	0.0453	589	442.410.729,00	124.250,66	15.336.308,33
	2013	0.0441	1.403	583.077.949,23	591.499,34	16.100.388,78
	2014	0.0413	326	617.842.292,52	1.107.208,44	16.925.260,46
	2015	0.0387	3.068	701.605.666,82	1.340.525,20	17.750.568,10
Kab Melawi	2011	0.0679	2.921	476.180.682,00	4.485,38	12.590.328,26
	2012	0.0676	2.835	690.995.266,01	43.749,57	13.144.148,09
	2013	0.0690	3.860	659.061.044,41	43.749,09	13.550.704,29
	2014	0.0696	2.530	793.523.572,39	83.809,94	13.952.260,46
	2015	0.0705	3.090	874.617.550,22	131.356,42	14.320.309,55
Kab Kayong Utara	2011	0.0150	1.261	123.625.034,83	0.00	17.055.323,76
	2012	0.0153	3.231	444.748.360,05	0.00	17.707.434,04
	2013	0.0165	2.150	506.115.481,76	0.00	18.301.456,31
	2014	0.0158	2.038	507.628.305,67	0.00	19.006.972,79
	2015	0.0164	1.927	543.156.726,97	186.000,00	19.547.319,58
Kab Kubu Raya	2011	0.0550	11.468	759.092.576,24	111.898,55	22.071.815,93
	2012	0.0577	13.808	805.466.698,38	914.967,94	23.132.334,12
	2013	0.0595	20.656	948.342.808,57	1.900.738,24	24.224.554,05
	2014	0.0640	15.132	1.034.435.209,63	2.177.184,97	25.313.118,27
	2015	0.0703	15.848	1.034.435.209,63	2.544.384,46	26.561.208,13
Kota Pontianak	2011	0.1765	18.183	891.672.005,60	219.415,71	28.406.790,06
	2012	0.1856	13.106	1.006.492.631,24	635.875,03	30.065.256,54
	2013	0.1951	15.313	1.309.158.722,46	653.682,86	31.890.035,24
	2014	0.1988	18.514	1.326.351.108,69	691.542,46	33.166.588,93
	2015	0.1984	26.325	1.413.949.851,60	578.048,74	34.226.641,64
Kota Singkawang	2011	0.0428	4.532	469.176.036,33	0.00	22.914.286,83
	2012	0.0442	4.738	515.601.489,11	22.495,00	23.978.543,22
	2013	0.0450	4.001	681.703.041,52	54.77600	25.068.491,68
	2014	0.0485	7.625	684.828.674,47	54.775,80	26.268.219,16
	2015	0.0491	5.148	769.476.314,33	66.941,10	27.164.851,78

Sumber : *Badan Pusat Statistik*, berbagai terbitan

Keterangan :

Pengangguran (Jiwa)

Belanja Daerah (Ribu Rupiah)

Investasi (Juta Rupiah)

PDRB per kapita (Rupiah)

Lampiran II
Hasil Estimasi *Common Effects*

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/02/17 Time: 16:07
Sample: 2011 2015
Included observations: 5
Cross-sections included: 14
Total pool (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-0.031182	0.019425	-1.605279	0.1133
X1?	3.35E-06	1.15E-06	2.901555	0.0051
X2?	1.88E-11	2.15E-11	0.874893	0.3849
X3?	-7.87E-09	3.66E-09	-2.147087	0.0355
X4?	2.93E-09	1.16E-09	2.525455	0.0140
R-squared	0.487332	Mean dependent var		0.055006
Adjusted R-squared	0.455783	S.D. dependent var		0.046376
S.E. of regression	0.034212	Akaike info criterion		-3.843738
Sum squared resid	0.076079	Schwarz criterion		-3.683131
Log likelihood	139.5308	Hannan-Quinn criter.		-3.779943
F-statistik	15.44691	Durbin-Watson stat		0.098816
Prob(F-statistik)	0.000000			

Lampiran III
Hasil Estimasi *Fixed Effects*

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/02/17 Time: 16:09
Sample: 2011 2015
Included observations: 5
Cross-sections included: 14
Total pool (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0.000752	0.012438	0.060422	0.9521
X1?	-1.27E-07	2.52E-07	-0.502849	0.6172
X2?	-1.02E-11	4.75E-12	-2.148804	0.0363
X3?	-2.17E-09	9.55E-10	-2.267096	0.0276
X4?	3.28E-09	7.49E-10	4.374118	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
_SMBS--C	-0.038930			
_BKY--C	-0.030877			
_LNDK--C	0.032422			
_PTK--C	0.018946			
_SNGGAU--C	-0.014913			
_KTP--C	0.036578			
_SNTG--C	-0.013561			
_KH--C	-0.045842			
_SKDAU--C	-0.003268			
_MLWI--C	0.031548			
_KU--C	-0.040300			
_KR--C	-0.004329			
_KOTAPTK--C	0.102411			
_KOTASKW--C	-0.029885			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.994425	Mean dependent var	0.055006
Adjusted R-squared	0.992603	S.D. dependent var	0.046376
S.E. of regression	0.003989	Akaike info criterion	-7.993735
Sum squared resid	0.000827	Schwarz criterion	-7.415551
Log likelihood	297.7807	Hannan-Quinn criter.	-7.764073
F-statistik	545.6580	Durbin-Watson stat	0.990201
Prob(F-statistik)	0.000000		

Lampiran IV
Hasil Estimasi *Random Effects*

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 01/02/17 Time: 16:11
Sample: 2011 2015
Included observations: 5
Cross-sections included: 14
Total pool (balanced) observations: 70
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-0.002792	0.015831	-0.176361	0.8606
X1?	-9.28E-08	2.51E-07	-0.370216	0.7124
X2?	-1.05E-11	4.68E-12	-2.248856	0.0279
X3?	-2.34E-09	9.49E-10	-2.465142	0.0163
X4?	3.46E-09	7.18E-10	4.822352	0.0000
Random Effects (Cross)				
_SMBS--C	-0.038884			
_BKY--C	-0.030470			
_LNDK--C	0.033162			
_PTK--C	0.019914			
_SNGGAU--C	-0.014982			
_KTP--C	0.035838			
_SNTG--C	-0.012813			
_KH--C	-0.045186			
_SKDAU--C	-0.002527			
_MLWI--C	0.032609			
_KU--C	-0.040052			
_KR--C	-0.005305			
_KOTAPTK--C	0.099663			
_KOTASKW--C	-0.030967			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.038994	0.9896
Idiosyncratic random			0.003989	0.0104
Weighted Statistiks				
R-squared	0.302577	Mean dependent var		0.002514
Adjusted R-squared	0.259658	S.D. dependent var		0.004676
S.E. of regression	0.004023	Sum squared resid		0.001052
F-statistik	7.050047	Durbin-Watson stat		0.788297
Prob(F-statistik)	0.000089			
Unweighted Statistiks				
R-squared	0.275605	Mean dependent var		0.055006
Sum squared resid	0.107499	Durbin-Watson stat		0.007715

Indeks Williamson Tahun 2011

Nama Daerah	Indek Williamson Tahun 2011				
	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	F_i/n	$(y_i - y)^2 \cdot f_i/n$	$\sqrt{(y_i - y)^2 \cdot f_i/n}$
Kab Sambas	-985743.03	971689315560.76	0.111929875	108761063201.69	329789.42
Kab Bengkayang	-1598475.72	2555124618295.37	0.049151194	125587425720.4	354383.16
Kab Landak	-4969396.24	24694898961729.60	0.07492203	1850191954369.00	1360217.61
Kab Pontianak	-4676751.73	21872006717333.70	0.053094376	1161280557342.87	1077627.28
Kab Sanggau	3040670.29	9245675829863.93	0.092902093	858942635196.34	926791.58
Kab Ketapang	6966027.37	48525537359395.00	0.097739331	4742853577710.94	2177809.35
Kab Sintang	-2005598.75	4022426334541.00	0.082933469	333593768318.75	577575.77
Kab Kapuas Hulu	428424.73	183547751723.71	0.050714619	9308554381.00	96480.85
Kab Sekadau	-4332742.05	18772653647079.70	0.04111876	771908248898.30	878583.09
Kab Melawi	-6390663.69	40840582362166.40	0.040699316	1662183757203.10	1289257.06
Kab Kayong Utara	-1925668.19	3708197966974.06	0.021808222	80869205183.35	284375.11
Kab Kubu Raya	3090823.98	9553192893004.88	0.113990023	1088968674398.68	1043536.62
Kota Pontianak	9425798.11	88845670064341.20	0.126381956	11228489605884.50	3350893.85
Kota Singkawang	3933294.88	15470808635510.20	0.042614735	659284415342.29	811963.31
Kalimantan Barat				24682223443151.20	4968120.715
Indeks Williamson Kalimantan Barat					0.26174189

Indeks Williamson Tahun 2012

Nama Daerah	Indek Williamson Tahun 2012				
	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	F_i/n	$(y_i - y)^2 \cdot f_i/n$	$\sqrt{(y_i - y)^2 \cdot f_i/n}$
Kab Sambas	-946942.13	896699405685.58	0.111079343	99604780612.64	315602.25
Kab Bengkayang	-1699310.86	2887657413479.46	0.049317001	142410602469.84	377373.29
Kab Landak	-5228977.71	27342207936496.70	0.074859949	2046836283532.38	1430676.86
Kab Pontianak	-5100794.60	26018105595110.30	0.052964235	1378029061122.46	1173894.83
Kab Sanggau	3201297.72	10248307064637.50	0.092885805	951922251959.72	975665.03
Kab Ketapang	6880818.44	47345662345265.60	0.098202161	4649446370933.50	2156257.49
Kab Sintang	-2126406.32	4521603855962.29	0.08289349	374811525144.49	612218.53
Kab Kapuas Hulu	201749.34	40702794461.16	0.050878437	2070894570.46	45507.08
Kab Sekadau	-4421268.03	19547611030996.70	0.04093491	800179706137.78	894527.64
Kab Melawi	-6613428.27	43737433539121.70	0.040755362	1782534922972.41	1335116.07
Kab Kayong Utara	-2050142.32	4203083549827.64	0.021865606	91902967606.31	303155.02
Kab Kubu Raya	3374757.76	11388989909753.70	0.114015195	1298517906007.01	1139525.30
Kota Pontianak	10307680.18	106248270604813.00	0.126550641	13445786701370.80	3666849.70
Kota Singkawang	4220966.86	17816561197038.50	0.042797866	762510793733.88	873218.64
Kalimantan Barat				27826564768173.70	5275089.077
Indeks Williamson Kalimantan Barat					0.266990697

Indeks Williamson Tahun 2013

Nama Daerah	Indek Williamson Tahun 2013				
	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	F_i/n	$(y_i - y)^2 \cdot f_i/n$	$\sqrt{(y_i - y)^2 \cdot f_i/n}$
Kab Sambas	-872692.43	761592082366.12	0.111081091	84598479701.59	290858.18
Kab Bengkayang	-1800582.26	3242096485315.75	0.049289297	159800657915.02	399750.74
Kab Landak	-5556110.90	30870368364848.00	0.074870626	2311283808170.98	1520290.70
Kab Pontianak	-5379971.45	28944092833557.80	0.052984955	1533601461026.87	1238386.64
Kab Sanggau	3336871.47	11134711188232.10	0.092897757	1034389696495.42	1017049.51
Kab Ketapang	6782043.10	45996108571503.10	0.098192719	4516482977754.97	2125201.87
Kab Sintang	-2120899.82	4498216058595.47	0.082882876	372825083334.51	610594.04
Kab Kapuas Hulu	36013.34	1296960452.16	0.050876106	65984296.81	8123.07
Kab Sekadau	-4492994.78	20187002118781.50	0.040946328	826583609418.59	909166.44
Kab Melawi	-7042679.27	49599331340331.60	0.040733676	2020363107053.09	1421394.78
Kab Kayong Utara	-2291927.25	5252930532389.30	0.021874683	114906189590.70	338978.16
Kab Kubu Raya	3631170.49	13185399106697.30	0.114043349	1503707067071.68	1226257.34
Kota Pontianak	11296651.68	127614339114694.00	0.126507064	16144115329952.90	4017974.03
Kota Singkawang	4475108.12	20026592660117.90	0.042819473	857528134001.40	926028.15
Kalimantan Barat				31480251585784.50	5610726.476
Indeks Williamson Kalimantan Barat					0.272452871

Indeks Williamson Tahun 2014

Nama Daerah	Indek Williamson Tahun 2014				
	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	F_i/n	$(y_i - y)^2 \cdot f_i/n$	$\sqrt{(y_i - y)^2 \cdot f_i/n}$
Kab Sambas	-672104.75	451724789211.67	0.1102368	49796695164.60	223151.73
Kab Bengkayang	-2080773.24	4329617258464.92	0.049378373	213789456618.12	462373.72
Kab Landak	-5748399.76	33044099751496.10	0.074828253	2472632255132.31	1572460.57
Kab Pontianak	-5391905.61	29072646060933.20	0.052908414	1538187588279.13	1240236.91
Kab Sanggau	2985333.06	8912213504717.51	0.093084254	829586748032.74	910816.53
Kab Ketapang	6331315.75	40085559180466.50	0.098434658	3945808295483.23	1986405.87
Kab Sintang	-2126457.47	4521821353492.03	0.082864354	374697805505.38	612125.65
Kab Kapuas Hulu	-216610.27	46920007212.81	0.050976518	2391818595.19	48906.22
Kab Sekadau	-4360209.18	19011424055983.10	0.040668621	773168404368.91	879299.95
Kab Melawi	-7333209.18	53775956814780.20	0.040775489	2192740955583.16	1480790.65
Kab Kayong Utara	-2278496.85	5191547875929.97	0.021899907	113694417756.77	337186.03
Kab Kubu Raya	4027648.63	16221953521263.60	0.114250292	1853362918534.39	1361382.72
Kota Pontianak	11881119.29	141160995685048.00	0.126820442	17902099902661.00	4231087.32
Kota Singkawang	4982749.52	24827792821769.50	0.042873624	1064457464556.04	1031725.48
Kalimantan Barat				33326414726271.00	5772903.492
Indeks Williamson Kalimantan Barat					0.271213348

Indeks Williamson Tahun 2015

Nama Daerah	Indek Williamson Tahun 2015				
	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	F_i/n	$(y_i - y)^2 \cdot f_i/n$	$\sqrt{(y_i - y)^2 \cdot f_i/n}$
Kab Sambas	-515613.21	265856986009.46	0.109219526	29036773883.51	170401.80
Kab Bengkayang	-2496168.55	6230857447838.88	0.049818627	310412762310.14	557146.98
Kab Landak	-5865029.35	34398569318254.50	0.074663843	2568329370579.17	1602600.81
Kab Pontianak	-5346796.28	28588230498013.20	0.052567306	1502806248246.15	1225889.98
Kab Sanggau	2738845.72	7501275858399.13	0.092825792	696311872734.57	834453.04
Kab Ketapang	6442516.87	41506023574216.60	0.099379402	4124843802595.70	2030971.15
Kab Sintang	-2213553.55	4899819334528.70	0.082761431	405516061689.93	636801.43
Kab Kapuas Hulu	-429953.04	184859619676.33	0.051361144	9494601549.35	97440.25
Kab Sekadau	-4230289.79	17895351737594.60	0.040377495	722569474421.98	850040.87
Kab Melawi	-7660548.34	58684000924195.00	0.040922011	2401467332406.03	1549666.85
Kab Kayong Utara	-2433538.31	5922108723620.08	0.022022209	130417916466.32	361134.21
Kab Kubu Raya	4580350.24	20979608288351.30	0.113874219	2389036514926.25	1545650.84
Kota Pontianak	12245783.75	149959219564294.00	0.12686264	19024222420035.10	4361676.56
Kota Singkawang	5183993.89	26873792614528.80	0.043344356	1164827231100.05	1079271.62
Kalimantan Barat				35479292382944.30	5956449.646
Indeks Williamson Kalimantan Barat					0.270983493